



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 2972-2979

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penerapan Prinsip Etika Lingkungan pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Literatur

Harmedi Yulian Saputra^{*1}, Nurhasan Syah², Aulia Azhar³

¹Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang

²Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang

³Ilmu lingkungan, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang

harmediy@unp.ac.id

Abstrak

Penerapan prinsip etika lingkungan menjadi komponen penting dalam upaya mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan mengkaji sejauh mana nilai-nilai etika lingkungan—seperti keadilan antargenerasi, tanggung jawab ekologis, dan hak-hak lingkungan—telah terintegrasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 11 artikel ilmiah terpilih dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada adanya kerangka moral yang menempatkan lingkungan hidup sebagai entitas bernilai intrinsik, bukan semata objek eksploitasi ekonomi. Temuan juga menyoroti peran strategis komunitas adat dan kearifan lokal sebagai mitra dalam konservasi, serta pentingnya pendekatan ekosentris dalam kebijakan tata kelola sumber daya. Hambatan utama mencakup lemahnya kapasitas institusional, rendahnya kesadaran ekologis, dan dominasi kepentingan ekonomi-politik yang sering kali mengabaikan pertimbangan etis. Dengan mengedepankan prinsip etika lingkungan, pembangunan dapat diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem, yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Studi ini merekomendasikan perlunya penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan reflektif terhadap nilai-nilai moral dan budaya lokal demi mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekosentrisme, Etika Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Keadilan Antargenerasi, Kebijakan Publik.

1. Latar Belakang

Isu lingkungan hidup kini menjadi perhatian global dan nasional, terutama dalam konteks perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan urbanisasi yang semakin pesat. Dunia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini, etika lingkungan muncul sebagai paradigma penting yang menekankan nilai intrinsik alam serta tanggung jawab moral manusia terhadap kelangsungan hidup seluruh makhluk. Prinsip-prinsip etika lingkungan mengajak untuk melihat alam bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi sebagai mitra hidup yang harus dihargai dan dilindungi [1]. Etika ini menuntut agar pembangunan tidak hanya mengejar aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi [2].

Di Indonesia, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, salah satunya melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 [3] tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pemerintah Indonesia secara aktif mengintegrasikan lebih dari 118 target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan bukan lagi persoalan sektoral semata, tetapi telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Pelestarian sumber daya alam bahkan ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMN tersebut, sejalan dengan semangat SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 15 (Ekosistem Daratan), serta SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak).

Lebih lanjut, kerangka hukum nasional juga memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 [4] tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat.

Laporan United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021–2025 menyebutkan bahwa Indonesia sedang berada dalam proses transformasi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan yang inklusif [5]. Transformasi ini hanya dapat berhasil apabila didukung oleh kerangka etika yang kuat, yang dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana tercermin dalam laporan capaian SDGs Indonesia 2023, menjadi kunci penting dalam mempercepat pencapaian target-target TPB. Ini mencakup berbagai sektor seperti energi bersih (SDG 7), konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SDG 12), serta kota dan permukiman yang berkelanjutan (SDG 11).

Namun demikian, tren urbanisasi yang meningkat pesat juga membawa tantangan tersendiri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2020, 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan angka ini diprediksi mencapai 66,6% pada tahun 2035. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan permasalahan serius seperti kemacetan, pencemaran udara, meningkatnya volume sampah, serta munculnya kawasan permukiman kumuh [6]. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pembangunan kota yang cerdas (smart city), tangguh (resilient), dan ramah lingkungan (green city) agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem.

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui pendekatan studi literatur terkini. Studi ini akan membandingkan berbagai pendekatan etis yang digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan dan konservasi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika lingkungan ke dalam sistem pengambilan keputusan. Dengan menelaah kerangka kebijakan nasional dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs, studi ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan praktis untuk mendorong pembangunan Indonesia yang lebih adil, lestari, dan manusiawi.

2. Metode Penelitian

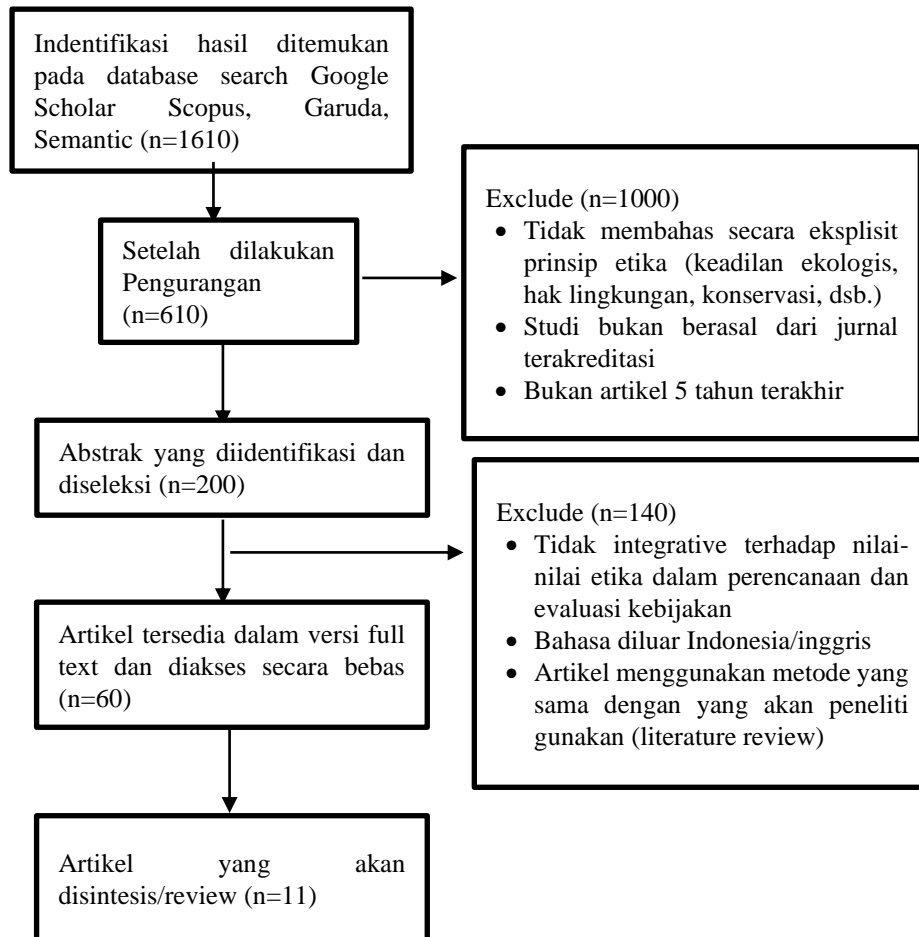
Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk memperoleh data. Literature review merupakan metode untuk menganalisis dan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. SLR dipilih karena memberikan pendekatan yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur ilmiah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan tren yang relevan dengan topik kajian secara menyeluruh.

Sumber yang digunakan dari pengumpulan data pada riset ini adalah artikel yang berasal dari jurnal berkaitan dengan Penerapan Prinsip Etika Lingkungan pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Dari hasil pencarian diperoleh sebanyak 11 artikel yang relevan dengan kajian artikel ini. Pencarian dari artikel ini juga sesuai dengan kriteria inklusi. Kriteria inklusi perlu dilakukan agar mendapatkan kesesuaian artikel yang telah dipilih sehingga kualitas dan ketelitian lebih baik [7].

Table 1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Artikel

No	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1	Artikel yang secara eksplisit membahas prinsip etika lingkungan seperti keadilan ekologis, tanggung jawab antar-generasi, hak-hak lingkungan, etika konservasi dalam konteks kebijakan pembangunan.	Artikel yang membahas pembangunan berkelanjutan tapi tidak menyebutkan atau mengkaji aspek etika lingkungan secara eksplisit.
2	Studi yang menganalisis penerapan atau integrasi nilai-nilai etika lingkungan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Artikel yang hanya membahas aspek teknis (engineering), finansial, atau ekonomi pembangunan tanpa mempertimbangkan prinsip etika atau lingkungan.
3	Artikel dari jurnal ilmiah terakreditasi yang dapat dipertanggungjawabkan akademis	Editorial, opini pribadi, artikel media massa, blog, laporan kebijakan pemerintah/tanpa peer-review.
4	Hanya artikel yang diterbitkan dalam rentang 5 tahun terakhir, agar relevan dengan isu dan kebijakan terbaru.	Artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2020 tidak disertakan.
5	Artikel harus dapat diakses secara penuh untuk	Artikel yang hanya menyediakan abstrak atau preview

No	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
	dapat ditelaah isi dan metodologinya.	dan tidak dapat diakses secara keseluruhan.
6	Bahasa publikasi yang digunakan adalah Indonesia atau Inggris, untuk kemudahan pemahaman dan analisis.	Studi yang membahas etika lingkungan tapi dalam konteks yang sangat lokal/spesifik budaya tanpa keterkaitan pada kebijakan pembangunan secara lebih luas.



3. Hasil dan Diskusi

Penelitian terkait Penerapan Prinsip Etika Lingkungan pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ditemukan sebanyak 11 artikel dari hasil review artikel dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2 Review Artikel

No	Judul Article	Tahun Terbit	Penulis	Review	Hasil
1	“Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Metafisika”	2023 [8]	Dody Grace Febryanto Rongrean	Article ini menekankan bahwa prinsip-prinsip etika lingkungan, yang berakar pada filsafat metafisik, menganjurkan untuk mengakui nilai intrinsik alam, mempromosikan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan harmoni antara manusia dan alam, penting untuk	Artikel ini menyimpulkan bahwa alam adalah harmoni yang harus dilestarikan dan dirawat. Implikasi dari pelestarian lingkungan adalah untuk membangun kesadaran bahwa alam merupakan bagian penting dari

No	Judul Article	Tahun Terbit	Penulis	Review	Hasil
				mengatasi krisis lingkungan Indonesia dan kelangsungan hidup manusia.	kelangsungan hidup manusia.
2	“Pembangunan dan Lingkungan Hidup : Dilema Etis Manusia”	2022 [9]	Dian F. Nanlohy	Artikel ini menekankan mengintegrasikan etika lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, menyoroti perlunya tanggung jawab moral terhadap alam. Ini berpendapat bahwa memahami hubungan erat antara manusia dan lingkungan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.	Pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Etika lingkungan memandu pengelolaan sumber daya dan konservasi yang bertanggung jawab.
3	“Environmental Ethics of Belu Society in Indonesia and Bobonaro Society in Timor Leste: An Ecological Reflection”	2021 [10]	F Fios, Benny, NT Martoredjo, Gadis Arivia	Artikel ini menekankan etika lingkungan asli lokal dari masyarakat Belu dan Bobonaro, menyoroti tradisi dan praktik mereka sebagai penting untuk pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai etika ini dapat menginformasikan kebijakan yang meningkatkan konservasi ekologi dan meningkatkan hubungan manusia-lingkungan di Indonesia.	Praktik adat lokal mendukung konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Etika lingkungan mencerminkan tradisi dan hubungan spiritual dengan alam.
4	“The Ecological Politics of the Belu Community in Preserving Nature and Supporting Sustainable Development”	2021 [11]	F Fios, N T Martoredjo, Benny	Artikel ini membahas ekologi politik komunitas Belu, menekankan nilai-nilai adat dan keadilan ekologis, yang dapat menginspirasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan etika lingkungan ke dalam praktik lokal untuk melawan kapitalisme dan mempromosikan keberlanjutan.	Komunitas lokal di Belu mempraktikkan ekologi politik untuk melawan kapitalisme. Mereka mendukung pembangunan berkelanjutan dan melindungi keadilan ekologis.
5	“Reorienting the Principle of Sustainable Development in Investing Policy Utilizing Natural Resources and Energy in Indonesia”	2022 [12]	Wahyu Nugroho 1	Artikel ini membahas perlunya reorientasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mengintegrasikan etika lingkungan ke dalam kebijakan investasi, menekankan paradigma ekosentrisme untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekologi, sehingga mengatasi kerusakan lingkungan dan	Artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan harus diorientasikan kembali. Perspektif pemerintah tentang pembangunan harus bergeser menuju paradigma ekosentrisme.

No	Judul Article	Tahun Terbit	Penulis	Review	Hasil
				meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
6	“Green Politics Sebagai Gerakan Hijau Demokratisasi Di Indonesia”	2023 [13]	Lily Andayani, Indah Dwiprigita ningtias	Artikel ini membahas perlunya ekokrasi di Indonesia, menekankan pembangunan berkelanjutan melalui etika lingkungan. Ini menyoroti integrasi prinsip-prinsip hijau ke dalam kebijakan nasional, mengadvokasi konstitusi hijau, undang-undang, dan anggaran untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang efektif.	Mempromosikan ekokrasi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Menyerukan konstitusi hijau, undang-undang, dan anggaran untuk implementasi.
7	“Legal Policy Of Implementation Green Economy In The Tourism Sector To Realize Sustainable Tourism And Environment”	2023 [14]	Lucky Nugroho	Artikel ini berfokus pada implementasi ekonomi hijau di sektor pariwisata Indonesia, menekankan keberlanjutan lingkungan. Ini tidak secara khusus membahas penerapan prinsip-prinsip etika lingkungan terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam literatur Indonesia.	Kebaruan rancangan peraturan di sektor pariwisata Akomodasi gagasan ekonomi hijau
8	“Indonesian Government Policy In Maintaining Environmental Conservation Of Marine Biota Through The Export Prohibition Of Lobster Shrimp Seed”	2023 [15]	Azis Setyagama	Artikel ini membahas komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan melalui etika lingkungan, menekankan larangan ekspor benih lobster untuk melestarikan biota laut, memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang, dan menyeimbangkan kesehatan ekologis dengan kebutuhan sosial ekonomi nelayan.	Larangan ekspor benih lobster telah mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam ekspor benih lobster Indonesia. Kebijakan ini efektif dalam melestarikan lingkungan dan kehidupan laut.
9	“Climate Change And Religion: From Ethics To Sustainability Action”	2021 [16]	Andi Luhur Prianto	Artikel ini mengeksplorasi prinsip-prinsip etika lingkungan, termasuk antroposentrisme, ekosentrisme, dan moral agama, menekankan integrasi mereka ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama melalui tindakan organisasi Islam yang menangani perubahan iklim dan mempromosikan kesadaran dan tanggung jawab ekologis.	Mengeksplorasi aspek etika perubahan iklim dan agama. Mengintegrasikan etika lingkungan dengan nilai-nilai moral agama untuk keberlanjutan.

No	Judul Article	Tahun Terbit	Penulis	Review	Hasil
10	“Etika Lingkungan Dalam Tradisi ‘Ngembang’ Di Sajira Lebak Banten: Upaya Penguatan Pendidikan Karakter (Kajian Folklor)”	2022 [17]	Khoerotun Nisa Liswati	Artikel ini membahas etika lingkungan dalam tradisi ngembang di Sajira Lebak, Banten, menyoroti prinsip-prinsip seperti teori yang berpusat pada kehidupan, etos tanah, perlakuan yang sama, dan teosentrisme, yang dapat menginformasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui praktik budaya dan nilai-nilai masyarakat.	Menjelaskan etika lingkungan dalam kegiatan tradisi ngembang. Menyoroti pendidikan karakter melalui ritual tradisional di masyarakat.
11	“Barriers To The Enforcement Of Environmental Law: An Effect Of Free Market Domination And Regional Autonomy In Indonesia”	2021 [18]	Jean Claude Geofrey Mahoro	Ma ini membahas penerapan filosofi lingkungan seperti ekosentrisme, antroposentrisme, dan biosentrisme dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia, menyoroti perlunya pertimbangan etis dalam penegakan hukum lingkungan di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh dominasi pasar bebas dan otonomi regional.	Dominasi pasar bebas dan otonomi regional menghambat penegakan hukum lingkungan. Korupsi dan mekanisme hukum yang tidak efektif menghambat implementasi hukum lingkungan.

Berdasarkan hasil review dari 11 artikel yang telah diperoleh melalui database pencarian google scholar, garuda dan semanthic google scholar berikut hasil reviewnya

3.1 Integrasi Nilai-nilai Etika Lingkungan ke dalam Kebijakan Publik

Sejumlah studi menggarisbawahi perlunya memasukkan nilai-nilai etika lingkungan ke dalam kerangka kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Kajian kualitatif menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada integrasi prinsip keadilan antargenerasi, tanggung jawab lingkungan, dan keberlanjutan di setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan. Pendekatan seperti triple bottom line menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan, selaras dengan saran Oyedipe (2016) [19] bahwa kebijakan publik harus mewujudkan “fair deal” antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan ekologis. Misalnya, [20] menemukan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan penting mengintegrasikan prinsip etika lingkungan secara konsisten dalam seluruh perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan kajian pun bervariasi: penelitian filosofis menegaskan landasan normatif etika [21], sementara studi kasus empiris dan alat analisis keputusan menawarkan kerangka kerja konkret untuk mengevaluasi opsi kebijakan secara etis. Secara keseluruhan, literatur menyimpulkan bahwa kebijakan publik di bidang lingkungan perlu dirancang tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi-teknis, tetapi dipandu pula oleh etika moral yang memperhitungkan kesejahteraan manusia dan pelestarian alam

3.2 Peran Etika Lokal dan Adat dalam Konservasi dan Pembangunan

Hasil kajian menunjukkan kearifan lokal/adat sebagai aktor penting dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai literatur mengungkap bahwa masyarakat adat sering menerapkan prinsip etis yang menjaga alam; misalnya dalam studi [11], masyarakat adat Belu (Indonesia) dan Bobonaro (Timor Leste) menjalankan nilai-nilai lokal dalam menjaga lingkungan yang penting bagi keberlanjutan pembangunan. Temuan [22] menegaskan bahwa komunitas adat bukan hanya objek kebijakan tetapi mitra utama dalam konservasi, karena kearifan lokal menawarkan model pelestarian alam yang sering lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan modern. [23] sejalan dengan hal ini, menunjukkan bahwa tradisi dan hak ulayat masyarakat adat efektif menciptakan harmoni manusia-alam. Perbedaan pendekatan terlihat pada beragam metodologi: analisis filosofis menyoroti kerangka nilai tradisional, sedangkan studi lapangan memberikan contoh konkret praktik konservasi berbasis etika lokal. Refleksi konseptualnya, integrasi prinsip etika lokal (baik norma adat maupun nilai keagamaan) ke dalam kebijakan konservasi nasional dapat memperkuat legitimasi kebijakan tersebut dan

meningkatkan keberhasilan implementasi secara partisipatif. Dengan demikian, pengakuan dan keterlibatan nilai-nilai lokal dalam strategi pembangunan berkelanjutan sangat relevan bagi konteks Indonesia yang multikultural, karena membantu menyelaraskan tujuan ekonomi dengan pelestarian sumber daya lokal.

3.3 Tantangan dan Hambatan dalam Kebijakan yang Etis dan Berkelanjutan

Berbagai penelitian mengidentifikasi kendala utama dalam menerapkan kebijakan berkelanjutan berbasis etika. Misalnya, [24] mencatat bahwa konflik kepentingan antar-pemangku kebijakan dan keterbatasan dana merupakan hambatan penting dalam kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Penelitian lapangan lain mengungkap rendahnya kesadaran ekologis publik sebagai kendala signifikan – [25] menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Kapasitas institusional juga menjadi masalah: upaya pemerintah dan lembaga terkait belum maksimal mengatasi kompleksitas permasalahan lingkungan. Faktor politik-ekonomi turut memperumit hal ini, sebagaimana [19] menegaskan bahwa analisis cost-benefit tradisional tidak mampu menyelesaikan dilema alokasi sumber daya publik karena berbagai kepentingan politik dan birokrasi yang kerap menenggelamkan pertimbangan moral dalam pengambilan kebijakan. Di tingkat lokal, tekanan modernisasi dan pembangunan menimbulkan tantangan serius bagi kearifan lokal; konflik sosial sering muncul ketika hak ulayat adat diabaikan, yang pada gilirannya dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kajian-kajian tersebut menyoroti hambatan struktural (pendanaan dan regulasi), kultural (sosialisasi etika), dan politik-ekonomi yang saling terkait dalam implementasi kebijakan etis berkelanjutan.

3.4 Peluang Reorientasi Paradigma Pembangunan ke Arah Ekosentris

Sebagian literatur menyoroti peluang untuk menggeser paradigma pembangunan menuju pendekatan yang lebih ekosentris. [21] menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dipandu oleh etika moral dan prinsip tanggung jawab kolektif, sesuatu yang sejajar dengan prinsip-prinsip ekosentris. [26] bahkan mengusulkan pengakuan nilai intrinsik setiap individu makhluk hidup, menolak dogma lama yang hanya menilai peran ekologis makhluk secara instrumental. Pandangan semacam ini konsisten dengan definisi ekosentrisme, yang menempatkan semua bentuk kehidupan pada nilai intrinsik yang setara. Dalam kerangka tersebut, kebijakan lingkungan berpeluang memperluas fokus dari semata-mata kesejahteraan manusia menjadi keadilan antargenerasi dan antarmakhluk hidup. Reorientasi paradigma ini membuka jalan bagi inovasi kebijakan – misalnya pengakuan hak-hak alam atau model tata kelola bersama yang lebih menghormati keseimbangan ekosistem. Meski pergeseran menuju pola pikir ekosentris memerlukan edukasi dan dukungan regulasi yang kuat, sejumlah tinjauan literatur menggarisbawahi bahwa perubahan perspektif inilah yang dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang kebijakan pembangunan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan literatur, jelas bahwa prinsip etika lingkungan memainkan peran sentral dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Integrasi nilai moral ke dalam proses kebijakan publik terbukti memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut, sedangkan kearifan lokal dan nilai adat menyediakan kerangka konservasi yang harmonis dengan alam. Tantangan utama terletak pada benturan kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran sosial, namun literatur menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika tetap dapat dijadikan landasan untuk mengatasi hambatan tersebut. Secara ringkas, penerapan nilai etika lingkungan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menekankan keadilan antargenerasi, tanggung jawab kolektif, dan kesejahteraan seluruh ekosistem. Implikasinya, pembuat kebijakan dianjurkan untuk mengedepankan keadilan antargenerasi, melibatkan komunitas adat, dan menyelaraskan kebijakan dengan prinsip ekologis. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggali mekanisme konkret implementasi etika lingkungan dalam konteks lokal Indonesia serta mengevaluasi dampaknya terhadap hasil pembangunan berkelanjutan..

Referensi

- [1] A. S. Manurung and N. Burhanuddin, "2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Penerapan Prinsip Etika Lingkungan di Komunitas Selaras Alam Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin," vol. 2, no. 10, pp. 159–174, 2024.
- [2] N. Utami, R. F. Saragih, M. Daulay, M. Daffa Maulana, and P. Ramadani, "Sosial Dan Ekonomi Indonesia," *J. Manag. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 2963–5047, 2023.
- [3] P. R. Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Nomor 136: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 2017.
- [4] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia no 32 tahun 2009*. tentang lingkungan hidup, 2009.
- [5] UNSDCF, "GOVERNMENT OF INDONESIA AND UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK Declaration of Commitment," 2020.
- [6] T. W. Prayojana, A. N. Fazri, and B. Saputra, "Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area)(The Impact of Urbanization on Slum Settlements (Slum Areas)," *J. Kependud. dan Pembang. Lingkung.*, vol. 2, no. 1, pp. 13–22, 2020, [Online].

- Available: <http://jkpl.pjj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/12/7>
- [7] Riandi, "Metodologi Penelitian Kuantitatif," pp. 0–17, 2020, [Online]. Available: <http://esaunggul.ac.id/0/18>
- [8] D. G. F. Rongrean, "Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Metafisika," *Rausyan Fikr J. Ilmu Stud. Ushuluddin dan Filsafat*, vol. 19, no. 1, pp. 109–130, 2023, doi: 10.24239/rsy.v19i1.1839.
- [9] D. Nanlohy, "Pembangunan Dan Lingkungan Hidup : Dilema Etis Manusia," *Tangkoleh Putai*, vol. 18, no. 2, pp. 129–144, 2022, doi: 10.37196/tp.v18i2.132.
- [10] F. Fios, Benny, N. T. Martoredjo, and G. Arivia, "Environmental Ethics of Belu Society in Indonesia and Bobonaro Society in Timor Leste: An Ecological Reflection," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 801, no. 1, 2021, doi: 10.1088/1755-1315/801/1/012010.
- [11] F. Fios, N. T. Martoredjo, and Benny, "The Ecological Politics of the Belu Community in Preserving Nature and Supporting Sustainable Development," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 801, no. 1, 2021, doi: 10.1088/1755-1315/801/1/012017.
- [12] W. Nugroho, "Reorienting the Principle of Sustainable Development in Investing Policy Utilizing Natural Resources and Energy in Indonesia," *Indones. J. Energy*, vol. 5, no. 1, pp. 15–24, 2022, doi: 10.33116/ije.v5i1.119.
- [13] A. Lily, "GREEN POLITICS SEBAGAI GERAKAN DEMOKRATISASI HIJAU DI INDONESIA," *J. Dialekt. Huk.*, vol. 5, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1615>.
- [14] L. D. Nugroho, S. R. Melati, I. Wahyuliana, A. Pawestri, and L. F. Kurniawan, "Legal Policy of Implementation Green Economy in the Tourism Sector to Realize Sustainable Tourism and Environment," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 1181, no. 1, pp. 6–11, 2023, doi: 10.1088/1755-1315/1181/1/012018.
- [15] AZIS SETYAGAMA et al., "Indonesian Government Policy in Maintaining Environmental Conservation of Marine Biota Through the Export Prohibition of Lobster Shrimp Seed," *Russ. Law J.*, vol. 11, no. 7s, pp. 314–322, 2023, doi: 10.52783/rlj.v11i7s.1169.
- [16] A. L. Prianto, A. Nurmandi, Z. Qodir, and H. Jubba, "Climate change and religion: from ethics to sustainability action," *E3S Web Conf.*, vol. 277, pp. 1–8, 2021, doi: 10.1051/e3sconf/202127706011.
- [17] K. N. Liswati, R. A. Prasetya, and N. N. Afidah, "Etika Lingkungan Dalam Tradisi 'Ngembang' Di Sajira Lebak Banten: Upaya Penguatan Pendidikan Karakter (Kajian Folklor)," *J. Kata Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, vol. 10, no. 1, pp. 44–50, 2022, doi: 10.23960/kata.v10.i1.202205.
- [18] M. J. C. Geoffrey and F. X. A. Samekto, "Barriers to the enforcement of environmental law: An effect of free market domination and regional autonomy in Indonesia," *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 31–45, 2021, doi: 10.20956/halrev.v7i1.1896.
- [19] V. O. Oyedipe, "Ethics and Sustainable Earth Economy : A Public Policy Analysis," vol. 7, no. 19, pp. 82–92, 2016.
- [20] I. Siregar, D. R., Aqilla, A. R., Syah, N., Heldi, & Catri, "Etika lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan: studi kualitatif," *Gudang J. Multidisiplin Ilmu.*, 2024.
- [21] K. Makokha, "The ethical foundations of environmental conservation and sustainable development," *Thought Pract. A J. Philos. Assoc. Kenya, New Ser.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–17, 2013.
- [22] Faridawaty, "Peran komunitas adat sebagai mitra dalam konservasi: Model pelestarian berbasis kearifan lokal," *Divers. J. Ilm. Univ. Medan Area*, 2024.
- [23] F. Putra, A. A., & Azhar, "Menghormati kearifan lokal dengan mengintegrasikan hak ulayat masyarakat adat pada strategi pembangunan dan konservasi berkelanjutan," *Kult. J. Ilmu Hukum, Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 6, pp. 243–253, 2024.
- [24] M. Rachman, N. F., & Sisawati, *Masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya*. Yogyakarta: Suplemen Wacana, Insist, 2014.
- [25] & S. Yustika, R. D., Tyasmoro, S. Y., "Sustainability status of peatland in different types of land use," *Agrivita J. Agric. Sci.*, vol. 2, no. 37, pp. 336–345, 2015.
- [26] N. R. Ferraro, K. M., Ferraro, A. L., Arietta, A. Z., & Sommer, "Revisiting two dogmas of conservation science," *Conserv. Biol.*, vol. 37, no. 4, 2023, doi: <https://doi.org/10.1111/cobi.14101>.